EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Arkea[1], Siti Nurlaela[2], R Dewi[3]
[1,2,3]Fakultas Ekonomi, Progam Studi Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta
Jl.KH.Agus Salim No.10, Jawa Tengah 57147, Indonesia
E-mail: arkeafero@gmail.com

Abstract

Rule number 3 Karanganyar Regency in 2015 set changes in income and expenditure budget for fiscal year 2015. Karanganyar Regency is one of the areas that implement decentralization policy and requires a lot of funds to finance regional development. The biggest potential possessed Karanganyar Regency in the financing of regional expenditures derived from local taxes and is expected to provide the largest contribution in local revenues. This study aims to determine the effectiveness of tax collection hotels and restaurants and its contribution to the local revenues Karanganyar Regency. Methods of data analysis in this research are descriptive analysis. The variables in this study are the ratio of the effectiveness and contribution analysis. Data analysis technique in this study is a quantitative analysis. Based on the analysis, the effectiveness rate of tax collection of hotel and restaurant of Karanganyar Regency and its contribution to the local revenue of the region in 2011-2016 states showed the same result with some previous research.

Keywords: Eeffectiveness, Ccontribution, Local Revenues.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya pemerintah daerah merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah dituntut tegas untuk terus menggali sumber pendapatan di daerahnya dalam rangka mendapatkan dana untuk melaksanakan pembangunan. Apalagi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu bersaing secara positif dalam kegiatan perekonomian jika tidak ingin ketinggalan dengan daerah lain.

Untuk mendukung jalannya pemerintahan yang mandiri, maka Pemerintah Daerah perlu mencari dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber daya yang telah dikelola oleh Pemerintah Daerah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi belanja daerah, belanja daerah disini lebih diarahkan pada belanja modal, karena belanja modal menjadi pendukung dari peningkatan sarana dan prasarana bagi pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator bagi penilaian kinerja pemerintah dalam mengemban amanah dari rakyat (Sholikhah, 2014)

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki secara efektif dan efisien dan mengembangkan potensi daerah yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Setiap daerah otonom dalam hal ini provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia, memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang bervariasi, sehingga jika dimanfaatkan dengan optimal maka akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat dalam pembangunan daerah (Hasannudin, 2015).

Menurut Budiarti, Nurlaela dan Masitoh (2015) akuntansi pemerintahan pada dasarnya adalah bagian dari akuntansi mikro yang berfungsi mencatat serta melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Kaitan yang sangat erat antara akuntansi pemerintahan

dengan penyelenggaraan anggaran negara ini, tidak hanya telah menyebabkan timbulnya perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan, akan tetapi juga menyebabkan sangat bervariasinya praktik akuntansi pemerintahan di berbagai negara di dunia. Dengan demikian, disamping disebabkan oleh keunikan sifat lembaga pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan di suatu negara juga sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, mekanisme pengurusan keuangan negara, dan sistem anggaran negara yang bersangkutan.

Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan makin diperhatikannya komponen pendukung yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah. Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Adanya perubahan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi, maka dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan besarnya potensi, keberadaan pajak hotel dan kontribusinya dalam pembangunan suatu daerah.

Jumlah hotel dan restoran yang telah berdiri semakin meningkat pada saat ini di Kabupaten Karanganyar, maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar. Menurut (Rustanto, Nurlaela, & Wijayanti, 2010) mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan tersebut diperoleh dari sektor hasil pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pajak hotel dan restoran selain dari sektor pajak daerah lainnya. Terkadang antara target dan realisasi penerimaan tidak sesuai dengan yang dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut dikarenakan adanya berbagai kendala atau hambatan dalam rangka pemungutan pajak hotel dan restoran (Maulana, 2013). Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Efektivitas menurut Sondang (2001) adalah: "Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya." Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan.

Mahmudi (2010) mendefinisikan efektivitas sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan , maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memnuhi tujuan yang diharapkan atau dapat dikatakan *spending wisely.*

Mahmudi (2010) dalam Alfan dkk. (2015) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel dan restoran maka peneliti menggunakan rumus:

a. Rumus Efektivitas Hotel

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} x100\%$$

b. Rumus Efektivitas Restoran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Restoran}} x100\%$$

Abdul Halim, 2008 dalam Yunanto (2015) menjelaskan mengukur efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Sesuai kriteria efektivitas menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif. Rasio efektivitas dikatakan efektif antara 90%-100%, pada presentase 80%-90%, pada presentase 60%-89% menunjukkan tingkat efektivitas yang kurang efektif.

Menurut T Guritno ,1997 dalam Hasannudin, 2015, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Mahmudi (2010), menjelaskan bahwa kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan

dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah periode tertentu dengan penerimaan pendapatan asli daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil.

a. Rumus Kontribusi Hotel

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} x100\%$$

b. Rumus Kontribusi Restoran

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} x100\%$$

Semakin besar analisis kontribusi, maka semakin besar kontribusi yang bisa disumbangkan dari pemungutan pajak hotel dan restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Dengan analisis ini akan diketahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Rasio antara 40%-50% menunjukan tingkat kontrbusinya baik, rasio 20%-40% menunjukkan kontribusi yang cukup baik, rasio 20%-30% sedang, rasio 10%-20% kurang, dan rasio 1%-10% mengartikan bahwa kontribusinya sangat kurang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data data yang bersifat pembuktian dari masalah sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian melalui langkah-langkah yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Peneliti memilih pajak hotel dan restoran dikarenakan perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Karanganyar yang terus berkembang sehingga menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung.

Tahapan-tahapann teknik analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Langkah pertama atau dasar yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan yang terjadi yaitu bagaimana menganalisis hasil efektivitas, potensi dan kontibusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah; 2) Untuk mengetahui sejauh mana pengukuran tingkat efektivitas, potensi dan kontribusi pajak hotel dan restoran berguna untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar; 3) Melakukan wawancara atau tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait seperti pimpinan, staf ataupun karyawan yang berhubungan dengan pengelolaan penerimaan pajak daerah untuk membantu dalam penyelesaian hasil penelitian ini; 4) Memberikan rekomendasi perbaikan atas dasar temuan-temuan permasalahan yang timbul mengenai tentang hubungan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah; 5) Langkah terakhir menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan (Candrasari, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel pada Tabel 1 Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2011-2016. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hotel kabupaten Karanganyar tahun 2011-2016 rata-rata mengalami peningkatan yang baik. Tahun 2011 rasio efektivitas menunjukkan angka 109,72% dengan kriteria sangat efektif. Di tahun 2012 sampai dengan 2014 juga selalu mengalami peningkatan, tahun 2012 meningkat sebesar 111,55%, tahun 2013sebesar 122,74% dan tahun 2014 sebesar 128,90%. Pada tahun 2015 mengalami peningkatan lagi yang cukup signifikan sebesar 16,53% menjadi 145,43% dan paa tahun 2016 mengalami peningkatan lagi menjadi 204,71%. Dengan demikian tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel sangat efektif dengan melihat prosentase rasio efektivitas yang selalu meningkat.

Tabel 1Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas	Hasil
2011	420.326.572,00	400.000.000,00	105,08	Sangat Efektif
2012	669.239.683,00	435.000.000,00	153,85	Sangat Efektif
2013	1.347.874.606,00	525.000.000,00	256,74	Sangat Efektif
2014	2.088.017.272,00	550.000.000,00	379,64	Sangat Efektif
2015	2.721.636.994,00	1.831.940.564,00	148,57	Sangat Efektif
2016	4.887.322.011,00	2.300.000.000,00	212,51	Sangat Efektif

Sumber :Data Diolah 2017

Tabel 2 Analisis Efektivitas Pajak Restoran

Tahun	Realisasi	Target	Rasio Efektivitas	Hasil
2011	768.051.869,00	700.000.000,00	109,72	Sangat Efektif
2012	892.392.616,00	800.000.000,00	111,55	Sangat Efektif
2013	1.037.118.730,00	845.000.000,00	122,74	Sangat Efektif
2014	1.114.948.203,00	865.000.000,00	128,9	Sangat Efektif
2015	1.560.412.241,00	1.072.965.300,00	145,43	Sangat Efektif
2016	3.731.793.997,00	1.822.965.000,00	204,71	Sangat Efektif

Sumber :Data Diolah 2017

Tabel 3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase Kontribusi (%)	Hasil
2011	768.051.869,00	104.080.774.268,00	0,74	Sangat Kurang
2012	892.392.616,00	116.706.893.419,00	0,76	Sangat Kurang
2013	1.037.118.730,00	161.715.929.349,00	0,64	Sangat Kurang
2014	1.114.948.203,00	215.298.860.199,00	0,52	Sangat Kurang
2015	1.560.412.241,00	255.445.549.750,00	0,61	Sangat Kurang
2016	3.731.793.997,00	250.472.357.000,00	0,14	Sangat Kurang

Sumber :Data Diolah 2017

Analisis Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana Tabel 2 diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Karanganyar tahun 2011-2016 rata-rata mengalami peningkatan yang sangat baik. Tahun 2011 rasio efektivitas menunjukkan angka 105,08% dengan kriteria sangat efektif. Di tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 153,85%. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sebesar 102,89% menjadi 256,74%. Peningkatan ini terjadi karena seiringnya pertumbuhan jumlah restoran di Kabupaten Karanganyar. Di tahun 2014 menga-lami kenaikan lagi yang cukup besar dari tahun 2013 sebesar 379,64%. Tahun 2015 mengalami penurunan namun yang cukup besar. Nilai efektivitas sebesar 379,64% di tahun 2014 turun derastis menjadi 148,57%. Penurunan ini bukan disebabkan karena banyak restoran yang gulung tikar tapi karena pemerintah Kabupaten Karanganyar menetapkan target pendapatan asli daerah Kabupaten Karangayar yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2014. Target yang semula sebesar Rp 550.000.000,00 di tahun 2014 menjadi Rp 1.831.940.564,00 pada tahun 2015 sedangkan realisasi anggaran juga mengalami peningkatan sebesar 76,72% dibandingkan tahun 2014 Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak restoran meningkat menjadi 212,51%. Jadi kriteria efektivitas tahun 2016 tetap menunjukkan sangat efektif.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 pajak hotel telah memberikan kontribusi sebesar 0,74% pada pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar dari total penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp.768.051.-869,00, pada tahun 2012 memberikan kontribusi sebesar 0,76% dari total realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 892.392.616,00. Di tahun 2013 kontribusi pajak hotel pada pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 0,64% dari besarnya pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 161.715.929.349,00. Tahun 2014 kembali mengalami penurunan dalam hal kontribusi terhadap pendapatan asli daerah menjadi 0,52% dari total penerimaan

Tabel 4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Presentase Kontribusi (%)	Hasil
2011	420.326.572,00	104.080.774.268,00	0,4	Sangat Kurang
2012	669.239.683,00	116.706.893.419,00	0,57	Sangat Kurang
2013	1.347.874.606,00	161.715.929.349,00	0,83	Sangat Kurang
2014	2.088.017.272,00	215.298.860.199,00	0,97	Sangat Kurang
2015	2.721.636.994,00	255.445.549.750,00	1,07	Sangat Kurang
2016	4.887.322.011,00	250.472.357.000,00	1,95	Sangat Kurang

Sumber: Data Diproses 2017

pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 215.298.860.199,00. Di tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 0,61% dari total penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 255.445.549.750,00. Pada tahun 2016 kontribusi pajak hotel mengalami penurunan menjadi 0,14%.

Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana Tabel 4 dapat dilihat kontribusi pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2011-2016. Kontribusi tahun 2011 sebesar 0,40% dari penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 104.080.774.268,00. Tahun 2012 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 0,57% dari total penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 116.706.893.419,00, pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 0,83% dari total penerimaan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 161.715.929.349,00. Pada tahun 2014 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 0,97% dari total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 215.298.-860.199,00 dan pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 1,07% dari total penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 255.445.549.750,00. Tahun 2016 pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 1,95% terhadap realisasi pendapatan asli daerah.

Pembahasan

Pajak hotel dan pajak restoran adalah salah satu bagian dalam pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian di atas menunjukan bahwa secara umum jumlah penerimaan pajak daerah dari tahun 2011-2016 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ni mengindi/-kasikan bahwa pajak hotel dan pajak restoran dapat membantu peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar guna membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah Kabupaten Karangayar. Bukan hanya itu, dengan demikian pajak daerah dapat melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi regulerend yang artinya dapat menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam bidang sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2011-2016 di Kabupaten Karanganyar bervariasi namun, secara keseluruhan sangat efektif. Kontribusi yang diberikan pajak daerah dalam hal ini pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2011-2016 di Kabupaten Karangayar dengan mengunakan metode kontribusi memberikan kontribusi yang masih sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah yang diterima Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alfan (2015) yang menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%. Dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah sehingga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa Utara yang diterima.

Efektivitas pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar dalam waktu 6 tahun sejak 2011-2016 mengalami peningkatan. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel terhadap anggaran yang sudah ditetapkan dengan persentase rata-rata 137,18% dan persentase

pajak restoran sebesar 209,4% dari tahun 2011-2016. Pada tahum 2011 kontribusi pajak hotel dari persentase 0,74%, menjadi 0,52% pada tahun 2014 dari pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar, pada tahun 2015 pajak hotel naik kembali sehingga kontribusi pajak hotel pada tahun 2015 mengalami peningkatan dengan persentase 0,61% sebelum pada akhirnya tahun 2016 menurun lagi menjadi 0,14%. Sedangkan pajak restoran pada tahun 2011-2015 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 nilai kontribusi sebesar 0,40% menjadi 1,95% pada tahun 2016. Walaupun kontribusi pajak hotel dan pajak restoran rata-rata selalu mengalami peningkatan namun nilai kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar masih sangat kurang.

KESIMPULAN

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karangayar periode tahun 2011-2016 secara rata-rata termasuk kriteria sangat efektif (>100%), tingkat efektivitas pajak hotel rata-rata dalam enam tahun sebesar 137,18% dan pajak restoran sebesar 209,4%. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan yang dilakukan peneliti dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pajak pada tahun tertentu dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Nilai rasio yang ditunjukkan selama tahun 2011-2016 merupakan kinerja yang sangat baik karena perolehan pajak hotel dan pajak restoran sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Peningkatan realisasi pajak hotel dan pajak restoran perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dengan cara lebih digiatkan lagi dalam pemungutannya.

Kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran pada pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar sangat kurang. Rata-rata dalam kurun waktu 2011-2016 pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah hanya dibawah 10%. Salah satu penyebabnya adalah naiknya jumlah realisasi penerimaan pajak daerah lain yang cukup signifikan mulai tahun 2011 sehingga berpengaruh terhadap presentase kontribusi pajak hotel dan pajak restoran tersebut. Pendapatan asli daerah yang meningkat berasal dari pajak penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya menggunakan data selama 6 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 saja dan hanya memfokuskan pada pajak hotel dan pajak restoran tanpa memperhatikan jenis pajak daerah lainnya.

Untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan data lebih dari 6 tahun. Pengambilan data diutamakan mendekati tahun dilakukannya penelitian. Fokus penelitian bisa mengambil semua yang termasuk pajak daerah. Selaian pajak daerah juga bisa menambahkan pajak retribusi daerah yang juga berperan banyak dalam menunjang pendapatan asli daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Disampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan ijin penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, Heince R. N Wokas. 2015. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara.” Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05.

Budiarti, Zega., Nurlaela, Siti., Masitoh, Endang. 2015. “Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pelaporan Keuangan Tahun 2010-2013 Pada Pemerintah Kota Surakarta.” Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Volume 34 No. 2. Surakarta.

Candrasari, Anita. 2016. “Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningktan Pendapatan Asli Darah Kota Surabaya.” Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Surabaya.

Hasannudin, Heince R. N. Wokas. 2015. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara”. Universitas Samratulangi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Tahun 1996

Keputusan Menteri Perdagangan Dalam Negeri No.690.900.327. Tahun 1994.

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Maulana, Ahmad Syahrir. 2013. "Analisis Pemungutan Pajak Hotel dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu. Jurnal p-ISSN: 2355-0538 Volume 02 Nomor 01.

Rustanto, Nurlaela, Wijayanti. (2010). "Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta." Paradigma, 43.

Sholikhah, Imroatus. 2014. "Analisis Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa." *Accounting Analysis Journal Volume 3 Nomber 4*. Semarang.

Sondang, P. Siagian. 2001. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. Jakarta. Rineka Cipta.

Yunanto, Lilik. 2010. "Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Republik Indonesia.